

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administratif, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tentang Desa merupakan salah satu strategi dari perwujudan Nawacita ke-3, yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah desa. Penerbitan undang-undang desa diharapkan memberikan peluang bagi aparatur pemerintah desa untuk mengelola segala tata pemerintahan serta mengurus pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Gayatri, 2018).

Desa mempunyai beberapa sumber pendapatan terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP 60, 2014).

Sumber penerimaan desa yang sangat banyak harus dikelola secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan (Azhar, 2015). Beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa adalah kepala desa dan perangkatnya, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Perencanaan Masyarakat Desa) dan perwakilan kelompok masyarakat desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ada di tangan kepala desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pengelolaan keuangan dana desa menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Jika dilihat dalam Tabel 1.1, pemberian dana desa kepada kabupaten/kecamatan di Rokan Hulu setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup besar. Adapun alokasi dana desa yang diperoleh setiap desa di kecamatan Rokan IV Koto, yaitu:

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa Kecamatan Rokan IV Koto tahun 2017-2019

No	Desa	2017	2018	2019
1.	Cipang Kanan	623.407.000	625.849.000	775.981.000
2.	Cipang Kiri Hulu	650.819.000	680.901.000	831.939.000
3.	Cipang Kiri Hilir	643.326.000	673.291.000	794.588.000
4.	Tanjung Medan	615.433.000	644.616.000	726.840.000
5.	Lubuk Bendahara Timur	623.877.000	653.117.000	753.589.000
6.	Lubuk Bendahara	597.492.000	626.795.000	723.469.000
7.	Sikebau Jaya	583.384.000	612.365.000	661.528.000
8.	Rokan Koto Ruang	646.755.000	676.650.000	841.902.000
9.	Rokan Timur	587.798.000	616.770.000	662.605.000
10.	Lubuk Betung	612.454.000	641.446.000	713.207.000
11.	Pemandang	625.050.000	654.673.000	765.815.000
12.	Alahan	609.680.000	638.633.000	677.107.000
13.	Tibawan	611.534.000	640.687.000	689.176.000

Sumber: Kantor Camat Rokan IV Koto, 2020

APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Kewajiban kepala desa dan aparatnya untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan APBDes. Pertanggungjawaban kepala desa disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Tanjung, 2013). Laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pertama, laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes yang harus disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, kedua, laporan semester akhir tahun yang harus dilaporkan bulan Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan SAP 24, 2005; IPSAS, 2010; PP 71, 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi empat karakteristik yaitu *pertama*, relevan. Informasi yang relevan memenuhi karakteristik: memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki nilai prediktif (*predictive value*), tepat waktu dan lengkap.

Kedua andal. Laporan keuangan bebas dari salah pengertian yang menyesatkan badan kesalahan material. Karakteristik yang dipenuhi adalah penyajian yang jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*) dan netralitas.

Ketiga, dapat dibandingkan. Laporan keuangan akan lebih berguna apabila informasi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan keempat, dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan (Harahap, 2013).

Pengelolaan APBDes diperlukan agar keuangan pemerintah dapat tertata secara maksimal melalui pengawasan dari pihak BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa“ (BPKP, 2020). Untuk mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Gayatri, 2018).

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah diperkenalkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak tahun 2015 dengan nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). SISKEUDES mulai diberlakukan untuk diterapkan pada pemerintah desa pada tahun 2016. Hal tersebut berdasarkan pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 terkait SISKEUDES yang ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut juga berisi himbauan kepada gubernur, bupati/walikota untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi SisKeuDes ini juga mempunyai tujuan agar pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. *Output* dari aplikasi ini memudahkan para desa untuk membuat laporan RPJM Desa dan RKP Desa, APB Desa, Dokumen Penatausahaan, Laporan Realisasi APB Desa, Laporan kekayaan milik desa, Laporan realisasi per sumber dana, Laporan realisasi tingkat Pemda.

Sistem yang diharapkan mampu menciptakan efektivitas dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, kenyataannya masih menimbulkan permasalahan dalam penerapan Siskeudes. Sehingga sistem tersebut dirasa belum maksimal dan efektif. Secara umum prinsip efektivitas sangat diperlukan agar penerapan Siskeudes dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan aparatur pemerintah desa sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban desa ke pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2013) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila tujuan organisasi telah tercapai maka dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Sedangkan Menurut Widjajanto (2014) menyatakan bahwa sistem dapat dikatakan efektif apabila sistem tersebut mampu menghasilkan suatu informasi yang dapat diterima dengan mudah diinformasikan secara tepat waktu, akurat, dan dipercaya.

Adanya sistem pengendalian internal yang baik akan membantu desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Arens (2014:370) sistem pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang

dirancang memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran yaitu :reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasional, dan ketaatan pada hukum dan aturan. Azhar (2015:8), pengendalian intern yang efektif akan membantu melindungi aset perusahaan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran.

Nuriliah (2014), Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa sistem pengendalian intern yang tidak efektif akan membuat seseorang lebih mudah untuk melakukan tindakan kecurangan yang akan merugikan perusahaan dan mengganggu keberlangsungan perusahaan, sehingga tujuan dari perusahaan tidak tercapai.

Selain efektifitas penerapan SISKEUDES dan efektifitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem informasi akuntansi juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi desa merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah desa ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing desa dalam proses penyusunan laporan keuangan desa (Sari dkk, 2014).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawan (2017), menunjukkan hasil bahwa efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Lestari (2020) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kualitas laporan keuangan dengan judul **“PENGARUH EFEKTIFITAS PENERAPAN SISKEUDES, EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA (studi pada Desa di Kecamatan Rokan IV Koto)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat di rumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah efektifitas penerapan SISKEUDES berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?
2. Apakah efektifitas sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?
3. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?
4. Apakah efektifitas penerapan SISKEUDES, efektifitas sistem pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa pengaruh efektifitas penerapan SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan desa.
2. Untuk menganalisa pengaruh efektifitas sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa.
3. Untuk menganalisa pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan desa.
4. Untuk menganalisa pengaruh efektifitas penerapan SISKEUDES, efektifitas sistem pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan membantu dalam mengaplikasikan teori ke dalam dunia kerja.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan untuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap desa yang membuat laporan keuangan lebih ketat serta membuat kebijakan mengenai sumber daya manusia, sistem pengendalian internal serta bagaimana sistem keuangan desa berjalan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.
3. Bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan kepala desa melakukan pemilihan sumber daya manusia untuk mengelola

keuangan desa dan mematuhi sistem pengendalian internal serta untuk menjalankan sistem keuangan desa secara efektif agar mendapatkan kualitas laporan keuangan desa.

4. Bagi akademik, diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam proses pengembangan ilmu akuntansi dan juga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini dengan fokus pada masalah bagaimana pengaruh efektifitas penerapan SISKEUDES, efektifitas sistem pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan desa yang ada di Kecamatan Rokan IV Koto.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Lestari (2020), melakukan penelitian dengan judul “pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel yang diteliti dan objek penelitian. Pada penelitian Lestari (2020) menggunakan variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern sebagai variabel independennya, sedangkan pada penelitian ini menggunakan efektifitas penerapan SISKEUDES, efektifitas sistem pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi sebagai variabel independennya. Pada penelitian Lestari (2020) menetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bandung sebagai objek penelitian, sedangkan pada penelitian ini memilih seluruh desa di Kecamatan Rokan IV koto sebagai objek penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan kajian pustaka, kerangka konseptual dan hipotesis. Pada kajian pustaka di bahas teori-teori atau konsep yang mendukung topik penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel serta analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai dalam melakukan penelitian menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat Emerson (2014:16) yang menyatakan bahwa “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (2016:17) yang menjelaskan bahwa :“efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Menurut Abdurahmat (2013:10), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya alam, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya (Siagian, 2013:15). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi

artinya apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2017:27).

Menurut pendapat Mahmudi (2013:31) mendefinisikan efektivitas, sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

2.1.2. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memasukkandan mengelola serta menyimpan data, mengendalikan dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Krismiaji, 2015:8).

Eksistensi dapat diperoleh agar tercapainya tujuan dalam suatu organisme sehingga membutuhkan informasi yang cukup. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian dari mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk mendapat laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar (Sutabri, 2012:6).

Menurut Romney dan Steinber (2015:25), sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan juga memproses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan. Adapun beberapa fungsi sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinber (2015:25) adalah:

1. Mengumpulkan dan memproses data tentang aktivitas bisnis organisasi secara efisien dan efektif.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai dalam menjaga aset-aset organisasi termasuk data organisasi, serta untuk memastikan bahwa data tersebut tepat pada saat dibutuhkan, akurat dan andal.

2.1.3. Keuangan Desa

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, Dimana desa diberi amanat untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya keuangan desa.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Implementasi tersebut selaras dengan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019, yaitu “membangun Indonesia di pinggiran

dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka NKRI”. Sebagai tindak lanjutnya, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBNP) pada tahun 2015 telah dilakukan alokasi dana desa sebesar kurang lebih 20,77 triliun rupiah dan pada tahun 2016 dana desa yang dialokasikan kurang lebih 46,9 triliun rupiah kemudian pada tahun 2018 telah dialokasikan dana desa sebesar 60 triliun rupiah dan yang terakhir pada tahun 2019 dana desa yang dialokasikan kurang lebih sebanyak 70 triliun rupiah , Dana desa ini akan bertambah disetiap tahunnya dan akan mencapai lebih dari 1 Miliar Rupiah untuk setiap desanya. Selain itu desa juga mengelola pendapatan asli desa dan pendapatan transfer lainnya yang terdiri dari hasil pajak dan retribusi kabupaten dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten. Data yang ada diolah oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa.

Menurut PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa.

- 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/wali kota
 - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juni tahun berjalan
 - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan desember tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap tahun anggaran kepada bupati/wali kota.
- 3) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

4) Penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintahan dan sumber daya alam, tentunya disertai dengan pertanggung jawaban yang besar. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Adapun indikator yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan eektifitas penerapan SISKUDES menurut Romney dan Steinber (2015:25), adalah:

1. Efektivitas dan produktivitas
2. Komunikasi Internal
3. Tanggung Jawab
4. Kinerja Organisasi

2.1.4. Sejarah SISKEUDES

Dalam rangka mengantisipasi penerapan UU No.6 Tahun 2014, tentang desa pengembangan aplikasi sistem keuangan desa telah dipersiapkan sejak awal, diikuti dengan adanya perhatian yang lebih dari komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun komisi pemberantas korupsi. Pada tanggal 13 Juli 2015, aplikasi sistem keuangan desa SISKEUDES yang awalnya bernama SIMDA launching sebagai jawaban atas pertanyaan yang ada di Rapat Depan Pendapat (RDP) komisi XI pada tanggal 30 Maret 2015, yang menyatakan tentang kepastian waktu yang penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP serta memenuhi rekomendasi KPK untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

SISKEUDES sebagai salah satu sistem informasi dengan fitur-fitur yang dibuat sederhana dengan User friendly sehingga mudah untuk digunakan. Aplikasi ini dapat menghasilkan output berupa laporan-laporan yang sesuai dengan perundang-undangan seperti Dokumen Penata Usahaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP), dll. Aplikasi ini juga memiliki beberapa kelebihan yaitu aplikasi dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (Built-in Internal Control), dan didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Oleh karena itu, penggunaan SISKEUDES ini ditunjukkan untuk meningkatkan kemudahan dalam hal pencatatan, penyusunan, dan pelaporan keuangan desa. Dengan begitu, kualitas laporan keuangan desa bisa meningkat.

2.2 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern merupakan proses kebijaksanaan atau prosedur yang dijalankan oleh direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan (Amanina, 2011:23).

Menurut Mulyadi (2012:180), definisi pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang keadaan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi.

Sejalan dengan Teguh (2015:264), menyebutkan defenisi sistem pengendalian internal meliputi susunan dan semua cara, peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menjaga dan mengamankan keuangan, memajukan efisiensi kerja dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh top manajer. Romney dan Steibart (2015:23) mendefinisikan sistem pengendalian internal adalah suatu proses karena termasuk didalam aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan pengelolaan.

Dalam laporan *Committe of Sponsoring Organizations (COSO)* yang dikutip oleh Boynton dkk dalam bukunya yang berjudul *Modern Auditing* (2010:373) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi

Dari beberapa pendapat tentang sistem pengendalian internal dapat disimpulkan bahwa Pengendalian intern merupakan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas-aktivitas perusahaan. Suatu perusahaan yang berjalan harus memonitor kegiatan dan hasilnya. Bagian manajemen juga harus mempunyai pandangan dan sikap profesional untuk memajukan dan maningkatkan hasil yang akan dicapai.

2.2.1 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Suatu perusahaan yang berjalan harus memonitor kegiatan dan hasilnya. Bagian manajemen juga harus mempunyai pandangan dan sikap profesional untuk memajukan dan meningkatkan hasil yang akan dicapai. Menurut Boyton (2013:13) mengidentifikasi lima unsur yang saling terkait dalam pengendalian internal:

1. *Control environmen* (lingkungan pengendalian)

Adalah menetapkan tujuan dari sebuah organisasi, yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen lain dari pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

2. *Risk assessment* (penaksiran resiko)

Adalah identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuannya entitas, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

3. *Control activities* (aktivitas pengendalian)

Adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa manajemen yang diarahkan telah dilakukan.

4. *Information and communication* (informasi dan komunikasi)

Adalah identifikasi, penangkapan dan pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.

5. *Monitoring* (pemantauan)

Adalah proses yang menilai kualitas internal kinerja kontrol.

Pendapat ini sejalan dengan Ikatan Akuntan Indonesia (2011:319) yang mengemukakan ada lima unsur (komponen) pengendalian yang saling terkait berikut ini:

1. Lingkungan pengendalian

Menetapkan corak organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian inter, menyediakan disiplin dan struktur.

2. Penaksiran resiko

Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisi terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

2.3 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah suatu subsistem dari sistem informasi manajemen (SIM) yang menyediakan informasi dan keuangan, juga informasi lain yang diperoleh dari pengolahan rutin atas transaksi akuntansi (Jones, 2011:10). Kinerja SIA yaitu penilaian terhadap pelaksanaan SIA yang digunakan pada suatu perusahaan dalam pencapaiannya memberikan informasi akuntansi keuangan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Krismiaji (2015:10), sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis.

Kemudian tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah mengelola dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan, memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan, pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan, serta penyajian keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Sedangkan untuk komponen-komponen sistem informasi akuntansi adalah sumber daya manusia yang terlatih, prosedur keuangan, dan akuntansi, formulir data keuangan, aplikasi akuntansi, serta perangkat keras berupa komputer yang terhubung dengan jaringan. Dalam upaya ini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SIA sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang membutuhkan informasi dan penentuan kesuksesan perusahaan (Anggraeni, 2012:12).

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Asniati (2013:5) adalah “Sistem pengumpulan data dan pemrosesan data transaksi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. Scott (2014:384) mendefinisikan sistem informasi akuntansi (SIA) sebagai sistem yang memberikan informasi rinci bagi suatu aktivitas operasi khusus atau kelompok aktivitas yang berhubungan, termasuk juga ikhtisar informasi untuk manajemen yang diperlukan untuk mengendalikan aktivitas tersebut.

Paul John Steinbart (2014:1) mendefinisikan, “Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan Akuntansi. Akuntansi itu sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Sedangkan Susanto (2014:72) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat penulis jelaskan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu kumpulan elemen dari suatu sistem dalam pengolahan data, mengumpulkan data juga mengubah data tersebut menjadi suatu informasi agar dapat dijadikan suatu bahan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.3.1. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart (2014:3), Sistem Informasi Akuntansi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, dan pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal hal yang telah terjadi.
2. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan manajemen dalam proses pengambilan keputusan untuk aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi, termasuk data organisasi untuk memastikan data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat dan andal.

2.3.2. Indikator Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi merupakan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komponen sistem berbeda-beda fungsinya tetapi tetap bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ada komponen yang berfungsi untuk menerima input, memproses data, menghasilkan output dan mengendalikan jalannya masing-masing komponen sistem, serta menyimpan data. Adapun indikator untuk mengukur berhasil tidaknya pemanfaatan sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart (2014:3) yaitu:

1. Membantu memproses transaksi dengan cepat
2. Membantu menghasilkan laporan tepat waktu

3. Memudahkan dalam memberikan penilaian
4. Meningkatkan tanggung jawab
5. Kendala dalam penggunaan sistem informasi akuntansi

2.4 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mulyana (2014:96) mengemukakan bahwa kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh Bastian (2015:9) laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Sementara menurut Mahmudi (2010:143) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

2.4.1. Tujuan Laporan Keuangan

Adapun tujuan laporan keuangan secara umum dan khusus yang dikemukakan Rasdianto (2013:21) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas

pelaporan yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”.

Sedangkan tujuan laporan keuangan secara khusus sebagai berikut :
“tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara khusus adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya”.

Ghozali (2014:235) menjelaskan bahwa tujuan umum pelaporan keuangan adalah menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan karakteristik menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi.

2.4.2. Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa karakteristik kualitatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
- b) Tepat waktu

c) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

a) Dapat diverifikasi (*verifiability*).

b) Penyajian jujur

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Hanafi (2014:16) kualitas informasi laporan keuangan daerah diukur dengan delapan indikator, yaitu:

1. Manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan
2. Ketepatan pelaporan laporan keuangan
3. Kelengkapan informasi yang disajikan
4. Penyajian secara jujur
5. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi
6. Keakuratan informasi yang disajikan
7. Isi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya
8. Kejelasan penyajian informasi dalam laporan keuangan

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

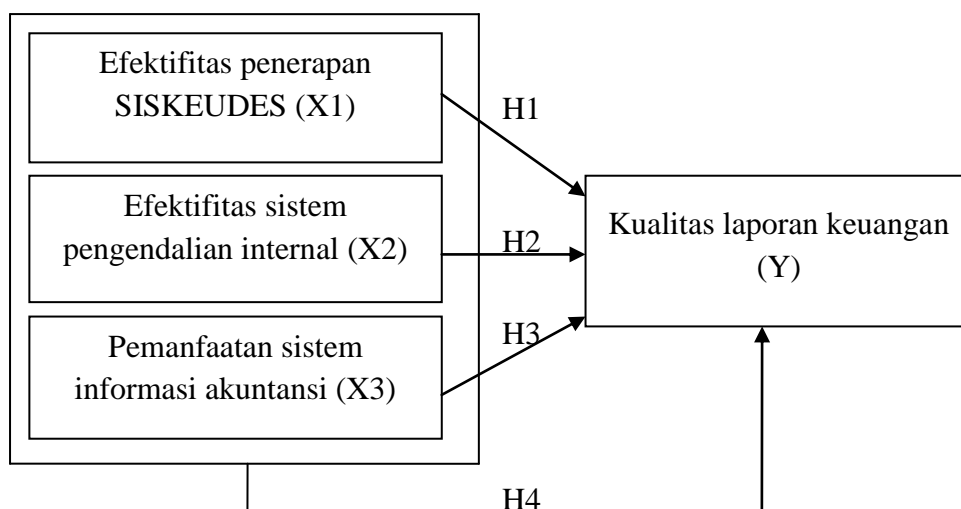
Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Yang Diperoleh
Lestari (2020)	Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.	Variabel independent: pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern Variabel dependen: kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Darmawan (2017)	Pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal, pengalaman kerja dan kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi pegawai negeri di Kabupaten Karangasem.	Variabel independent: efektivitas sistem pengendalian internal, pengalaman kerja dan kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi Variabel dependen : kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel efektivitas pengendalian internal, pengalaman kerja dan kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
Gayatri (2018)	Efektivitas penerapan siskeudes dan kualitas laporan keuangan dana desa	Variabel independent: efektivitas penerapan siskeudes Variabel dependen: kualitas laporan keuangan	Bahwa penerapan SISKEUDES efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana desa di Kabupaten Badung.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik hipotesa pada penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ : Diduga efektifitas penerapan SISKUEDES memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.
- H₂ : Diduga efektifitas sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.
- H₃ : Diduga pemanfaatan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.
- H₄ : Diduga efektifitas penerapan SISKUEDES, efektifitas sistem pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penulisan ini yang menjadi objek penelitian adalah kualitas laporan keuangan pada Desa di Kecamatan Rokan IV Koto.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif kausalitas yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih atau lebih singkatnya penelitian ini merupakan mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya (Setyosari, 2014:23).

3.3. Populasi dan sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh desa yang memperoleh bantuan dana desa Kecamatan Rokan IV Koto sebanyak 13 desa seperti terlihat pada tabel 3.1. berikut:

**Tabel 3.1
Daftar Desa Yang Memperoleh Bantuan Dana Desa
Kecamatan Rokan IV Koto**

No	Nama Desa	No	Nama Desa
1.	Cipang Kanan	8.	Rokan Koto Ruang
2.	Cipang Kiri Hulu	9.	Rokan Timur
3.	Cipang Kiri Hilir	10.	Lubuk Betung
4.	Tanjung Medan	11.	Pemandang
5.	Lubuk Bendahara Timur	12.	Alahan
6.	Lubuk Bendahara	13.	Tibawan
7.	Sikebau Jaya		

Sumber: Kantor Camat Rokan IV Koto, 2020

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling, dimana penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sekaran, 2013:26). Adapun kriteria sampel yaitu orang-orang yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan dan pengambilan keputusan penggunaan dana desa seperti kepala desa, bendahara, sekretaris desa, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Kecamatan Rokan IV Koto. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 65 orang (13 x 5 perangkat desa = 65 orang).

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif, berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi, serta data-data lain yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan di peroleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang terpilih berupa respon tertulis dan lisan sebagai tanggapan atas wawancara yang diajukan oleh peneliti kepada pihak terkait. Serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari desa dalam bentuk data dan dokumen yang ada pada di desa Kecamatan Rokan IV Koto.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Kuesioner menurut Setyosari (2014:23) merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai masalah yang akan diteliti.

3.6. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Defenisi operasioanal adalah operasionalisasi konsep agar dapat diteliti atau diukur melalui gejala-gejala yang ada. Defenisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator agar lebih memudahkan dalam operasionalisasi dari sudut penelitian. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Efektifitas penerapan SISKUEDES (X1)	1. Efektivitas dan produktivitas 2. Komunikasi Internal 3. Tanggung Jawab 4. Kinerja Organisasi
Efektifitas sistem pengendalian internal (X2)	1. Lingkungan pengendalian 2. Penaksiran resiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi (X3)	1. Membantu memproses transaksi dengan cepat 2. Membantu menghasilkan laporan tepat waktu 3. Memudahkan dalam memberikan penilaian 4. Kendala dalam penggunaan sistem informasi akuntansi 5. Keputusan

Kualitas laporan keuangan desa (Y)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dipahami 4. Dapat dibandingkan
---------------------------------------	--

Sumber: Lestari (2020)

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis deskriptif

Pengertian statistik deskriptif menurut Sugiyono (2012:206) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selain itu Sugiyono (2012:206) berpendapat yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan perhitungan persentase.

3.7.2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur (dalam hal ini kuisioner) melakukan fungsinya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dari suatu instrument (sugiyono, 2010:55). Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan korelasi *Pearson Validity* dengan teknik *Product Moment* yaitu setiap skor tiap item dikorelasikan dengan skor total. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka data dapat dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Suatu kuisioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang konsisten dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2010:56). Pengujian reliabilitas menggunakan *cronbach alpha*. Suatu alat dikatakan handal jika nilai *cronbach alpha* $> 0,60$.

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar data yang akan dimasukkan dalam model regresi telah memenuhi ketentuan dan syarat dalam regresi.

3.7.3.1 Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2013:110). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan statistik *Kolmogorov-Smirnov* dengan SPSS 17. Kriteria yang digunakan adalah membandingkan nilai *Asymp. Sig(2-Tailed)* dengan nilai alpha 5% sehingga apabila nilai *Asymp. Sig(2-Tailed)* $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tersebut berasal dari populasi yang terdistribusi normal.

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat diuji melalui nilai toleransi dengan faktor variasi inflansi (VIF) < 10 , maka model tersebut menunjukkan tidak ada multikolinearitas.

3.7.3.3 Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedasitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot*.

3.7.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh antara *dependent variable* dengan *independent variable* yang dapat dinyatakan dengan rumus (Sekaran, 2012:27):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- Y = Kualitas laporan keuangan desa
- a = Nilai Konstanta, yaitu besarnya Y bila X = 0
- b = Koefisien regresi dari variabel bebas
- X1 = Efektifitas penerapan SISKEUDES
- X2 = Efektifitas sistem pengendalian internal
- X3 = Pemamfaatan sistem informasi akuntansi
- e = *Error*

3.7.5. Pengujian Hipotesis

3.7.5.1 Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Sugiyono (2012:123), koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen atau tidak bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai (R²) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

3.7.5.2 Uji parsial (Uji t)

Uji Parsial dengan Uji t untuk membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji statistik t dapat dilihat pada tabel *Coefficients*. Kriteria pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, Sugiyono (2012:123):

- a. Membuat rumusan hipotesis kerja, yaitu:
 - $H_0 = 0$, Artinya variabel bebas tidak ada hubungan linier pada variabel terikat (kualitas laporan keuangan desa).
 - $H_a \neq 0$, Artinya variabel bebas ada hubungan linier pada variabel terikat (kualitas laporan keuangan desa).
- b. Taraf signifikansi/derajat keyakinan 5%.
- c. Menentukan kriteria dan membuat kesimpulan berdasarkan ketentuan yang sudah ada, yaitu:
 - Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai Sig. lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
 - Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai Sig. lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.7.5.3 Uji F

Uji F dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji statistik F dapat dilihat dari hasil output ANOVA. Kriteria pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, Sugiyono (2012:123):

- a. Membuat rumusan hipotesis kerja, yaitu:

- $H_0 = 0$, Artinya variabel bebas tidak berpengaruh pada variabel dependen (kualitas laporan keuangan desa).
 - $H_a \neq 0$, Artinya variabel bebas berpengaruh pada variabel dependen (kualitas laporan keuangan desa).
- b. Menentukan kriteria dan membuat kesimpulan berdasarkan ketentuan yang sudah ada, yaitu:
- Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau nilai Sig. lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai Sig. lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.